

Bab II

Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia

II.1 Pergerakan kaum Perempuan Indonesia

Peranan perempuan Indonesia dalam menegakkan kehidupan bangsa tidak dapat diabaikan begitu saja. Sudah sejak lama mereka terjun dalam perjuangan, bahu membahu dengan kaum laki-laki untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Masa pergerakan Nasional adalah suatu masa dimana bangsa Indonesia dalam perjuangannya untuk melepaskan diri dari penjajahan asing tidak mengandalkan lagi pada kekuatan senjata, melainkan dengan menggunakan suatu organisasi yang teratur. Kesadaran akan perlunya suatu organisasi dalam mewujudkan cita-cita, menyebabkan pula pada periode ini disebut dengan masa Kebangkitan Nasional. Ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian hari diikuti oleh munculnya organisasi-organisasi lainnya. Pada dasarnya tujuan perkumpulan-perkumpulan pemuda tersebut adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam perkembangan lebih lanjut, kaum pergerakan sadar bahwa kemerdekaan itu akan lebih cepat tercapai dengan adanya persatuan diantara mereka. Untuk itulah mereka mencoba menggalang persatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Setelah berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 disusul dengan penyelenggaraan kongres-kongresnya, dampak positif yang dapat diambil terutama untuk kemajuan perempuan adalah banyaknya kaum perempuan yang terpelajar. Usaha untuk mengikuti jejak Budi Utomo cenderung meningkat. Pada tahun 1912 berdiri Poetri Mardika dengan mendapatkan dukungan yang kuat dari Budi Utomo. Perkumpulan perempuan ini berdiri di Jakarta dengan tujuan antara lain memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada gadis-gadis pribumi dalam menuntut haknya untuk mendapatkan pengajaran dan mengutarakan maksudnya di muka umum, dan juga keterampilan-keterampilan yang belum diketahui oleh para gadis-gadis ini. Salah satu usaha untuk mencapai maksud tersebut adalah Poetri Mardika menerbitkan majalah bulanan *Poetri Mardika*. Melalui media tersebut diharapkan berbagai ide gagasan pemikiran maju bisa

sampai kepada perempuan Indonesia baik yang berada di Jakarta maupun yang berada di luar Jakarta.

Tumbuhnya perkumpulan-perkumpulan pemuda itu tidak terlepas dari pengamatan kaum perempuan. Kaum perempuan pun bergerak mendirikan perkumpulan-perkumpulan perempuan. Pada awalnya kegiatan mereka ditekankan pada perbaikan kedudukan sosial dalam perkawinan dan keluarga serta peningkatan keterampilan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga. Dalam perkembangan lebih lanjut kegiatan mereka ini berkembang menyesuaikan zaman, permasalahan perempuan ternyata lebih rumit bukan hanya sekedar permasalahan yang menyangkut kehidupan keluarga, melainkan juga permasalahan yang menyangkut kehidupan sosial Perempuan, contohnya buruh perempuan. Ketika pada tanggal 28 Oktober 1928 dihasilkan Sumpah Pemuda, maka pada tanggal 22-25 Desember 1928 para kaum perempuan menyatukan gerak langkah perjuangan dengan mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I.

II.2 Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII)¹⁷

Dengan adanya perjuangan emansipasi yang dirintis oleh R.A. Kartini pada penghujung abad ke-19, dunia perjuangan Indonesia tidak hanya milik kaum laki-laki saja, melainkan juga melibatkan kaum perempuan. Hal ini dapat terlihat dengan bermunculannya organisasi-organisasi perempuan pada masa pergerakan tersebut. Organisasi-organisasi perempuan yang muncul pada awal abad ke-20, semula umumnya hanya bersifat sosial budaya, lebih menekankan perjuangannya kepada perbaikan kedudukan sosial perempuan, seperti hal-hal yang menyangkut perkawinan, keluarga, peningkatan keterampilan perempuan, serta pendidikan.

Jika pada tanggal 17 Desember 1927 partai-partai politik yang merupakan gerakan nasional, bergabung dalam badan politik Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, di singkat PPPKI. Maka pada tanggal 22-25 Desember 1928, perkumpulan-perkumpulan perempuan yang mengadakan kongres di Yogyakarta, membuat suatu badan federasi yang bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Pada awal berdirinya, badan federasi ini bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), lalu pada tahun

¹⁷ Lihat lampiran 6, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPII.

1929 berubah menjadi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII). Badan federasi ini merencanakan setiap satu tahun sekali diadakan kongres, bertujuan untuk membicarakan pengorganisasian maupun kegiatan-kegiatan untuk memajukan perempuan Indonesia.

PPII banyak mengalami perubahan, baik dalam organisasi maupun keanekaragaman serta sifat kegiatan sesuai dengan tuntutan zaman dan potensi-potensi anggota-anggotanya. Pada tahun-tahun awal berdirinya PPII perhatiannya tertuju pada perbaikan nasib perempuan dalam lingkungan keluarga, misalnya kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan (Islam), perlindungan perempuan dan anak-anak dalam perkawinan, mencegah perkawinan anak-anak, pendidikan bagi anak-anak, khusus bagi anak-anak perempuan dibentuk badan yang menyediakan beasiswa.

Bidang-bidang yang mendapatkan perhatian lebih pada Kongres Perempuan Indonesia II pada tanggal 20-24 Juli 1935 di Jakarta, yaitu dibentuknya Badan Penyelidikan Perburuhan Kaum Perempuan, mengingat nasib buruh yang sangat menyedihkan, khususnya pada industri batik, maka dibuatlah badan ini. PPII pernah mengadakan rapat umum di Lasem (Jawa Tengah) untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada buruh batik perempuan agar sadar akan hak-haknya yang terabaikan oleh para pemilik pabrik. PPII juga membuat Badan Pemberantasan Buta Huruf, PPII juga turut serta dalam Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan anak-anak, badan ini berusaha memberantas praktek dijualnya anak gadis kepada “Cina Minding”¹⁸ untuk menebus hutang dengan bunga yang sangat tinggi.

Meskipun PPII bukanlah organisasi politik, tetapi PPII menyatakan dalam Anggaran Dasar badan federasi bahwa gerakan perempuan ini berasaskan kebangsaan dan menjadi bagian dari Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Pada Kongres Perempuan Indonesia II pada tahun 1935, PPII juga menyatakan bahwa kaum perempuan adalah sebagai “Ibu Bangsa”, perempuan mempunyai tanggung jawab lebih terhadap kemajuan bangsa melalui cara mendidik anak-anaknya yang

¹⁸ Dalam bahasa belanda, *Minding* berarti pengurangan. Dikaitkan dengan para buruh, Taoketaoke atau para pemilik pabrik sering mengadakan pengurangan-pengurangan upah para buruh untuk setiap kesalahan yang diperbuat, bahkan untuk kesalahan yang tidak masuk akal, hanya dibuat-buat oleh pemilik pabrik tersebut. Misalnya ada pengurangan upah ketika para buruh mengambil kayu di halaman, padahal kayu tersebut untuk memasak lilin untuk dijadikan batik.

merupakan generasi penerus. Dalam Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung di bahas tentang hak pilih dan memilih bagi perempuan Indonesia dan pada tahun 1941, PPII memutuskan membantu GAPI, yang bertujuan agar Indonesia berparlemen, yaitu dengan mengirimkan mosi kepada Pemerintah Hindia-Belanda agar kaum perempuan mempunyai hak pilih (tidak hanya memilih) untuk menjadi anggota Dewan Kota.

PPII mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur arah perjuangan dan kegiatan-kegiatan badan federasi tersebut serta hal-hal yang mengatur tentang keanggotaan perkumpulan. PPII mempunyai asas-asas sebagai dasar perjuangan, yaitu: kedudukan kaum perempuan dan laki-laki harus seimbang, perempuan mempunyai kebebasan tetapi harus sesuai dengan tata cara/kesusilaan paham kebangsaan Indonesia,¹⁹ dan pergerakan kaum perempuan Indonesia adalah bagian dari pergerakan Kebangsaan Indonesia.

Maksud dari PPII adalah memajukan perkumpulan-perkumpulan perempuan yang tergabung didalamnya dan juga memikirkan kemajuan bangsa Indonesia. Karena PPII merupakan badan federasi yaitu kumpulan dari organisasi perempuan yang mempunyai haluan pergerakan yang berbeda, maka untuk mencapai maksud tersebut tidak ada perubahan dalam asas dan organisasi masing-masing anggota PPII.²⁰

Untuk mencapai maksud itu, PPII berusaha memperbaiki keadaan perkumpulan-perkumpulan yang tergabung didalamnya, misalnya dengan mengawasi kegiatan perkumpulan-perkumpulan perempuan yang tergabung dalam PPII. Mendukung perkumpulan-perkumpulan perempuan tersebut kearah kemajuan salah satunya dengan cara menerbitkan surat kabar, para perempuan ini bisa menyalurkan pemikirannya dengan menulis pada surat kabar ini. Mencari informasi dan mengadakan hubungan dengan dunia internasional. Dan juga menjalin hubungan yang baik antar perempuan Indonesia, baik yang tergabung dalam PPII maupun semua perempuan Indonesia. Dan PPII menjadi hakim pemisah untuk mendamaikan anggota-anggotanya ketika ada yang berselisih paham.

¹⁹ Emansipasi, tetapi tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan.

²⁰ “Anggaran Dasar dan Anggaran Roemah Tangga dari P.P.I.I., Anggaran Dasar, “*Isteri*, (1933), hal. 97

Tentang masalah keanggotaan, PPII hanya mempunyai anggota biasa dan yang boleh diterima menjadi anggota yaitu segala perhimpunan kaum perempuan Indonesia, yang mengakui bertanah tumpah darah Indonesia. Permintaan untuk menjadi anggota PPII harus disertai Anggaran Dasar atau keterangan yang cukup tentang asas perkumpulannya dan pengurus harian mempunyai hak untuk menolak permintaan untuk menjadi anggota, jika memang persyaratannya tidak terpenuhi. Berhentinya dari keanggotaan PPII yaitu karena permintaan sendiri, jika dalam 6 bulan berurut-turut tidak membayar iuran tetap (walaupun sudah diperingatkan oleh pengurus), dari putusan pengurus, karena ada perbuatan dari anggota yang mengecewakan atau bertentangan dengan asas PPII atau tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota, atas putusan pengurus itu, anggota yang dikeluarkan boleh minta keadilan kepada kongres.²¹

Dalam hal kepengurusan, PPII dijalankan oleh pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 7 orang: ketua, wakil ketua, panitera I dan II, bendahara, dan pembantu-pembantu. Tentang tata cara pemilihan pengurus, yaitu ketua dipilih oleh kongres. Ditempat kedudukan ketua sedikitnya ada 5 orang (ketua, wakil ketua, sekretaris I, sekretaris II dan bendahara) yang bekerja sebagai pengurus harian. Pengurus hanya diangkat 2 tahun lamanya, tapi anggota-anggotanya setelah meletakkan jabatan, maka boleh dipilih kembali. Untuk melengkapi jumlah anggotanya, maka ketua boleh menambah jumlah anggotanya sendiri. Penambahan anggota ini harus di sahkan melalui pengumuman di majalah pertalian. Pengurus bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan keadaan PPII kepada kongres.

Kewajiban dari ketua yaitu wajib memimpin segala persidangan, baik sidang pengurus, maupun kongres (konferensi). Ketua bertanggung jawab kepada pengurus lengkap. Kewajiban dari wakil ketua adalah jika ketua berhalangan hadir, maka wakil ketua harus menggantikan posisinya, karena itulah wakil ketua harus mengikuti segala kegiatan yang dilakukan oleh PPII dengan seksama. Kewajiban sekretaris adalah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat, memegang, dan melengkapi buku anggota, menyimpan arsip dan mengatur segala urusan dari badan pengurus. Pada saat kongres ia wajib

²¹ Ibid, hal 98

mengumumkan *verslag* (laporan) tentang segala kegiatan PPII. Sedangkan kewajiban dari bendahara adalah wajib menjaga ketertiban penerimaan dan pengeluaran uang dan menulisnya dalam buku-buku administrasi sehari-hari. Pada saat kongres ia harus membuat laporan dengan disertai perhitungan dan pengesahan. Kewajiban dari anggota-anggota yang membantu yaitu sebagai anggota pengurus wajib mengikuti segala kegiatan, dan wajib memajukan usaha yang berguna untuk badan itu.²²

Dalam semua persidangan PPII, setiap pengambilan keputusan harus dimufakatkan oleh suara yang terbanyak, kecuali jika ada ketetapan lain. Pengeluaran suara tentang orang harus dilakukan dengan suara tertulis, yang dirahasiakan. Tiap-tiap anggota mempunyai hak satu suara dan pengurus mempunyai hak untuk memutuskan, jika dalam pungutan suara, ternyata jumlah suara berimbang.

Pengurus PPII boleh menerbitkan surat kabar yang menjadi tempat menyuarakan ide-ide pemikiran, yang diharapkan memberikan inspirasi bagi kaum perempuan Indonesia. Aturan tentang terbitnya surat kabar harus ditetapkan oleh Sidang Pengarang. Dan Sidang Pengarang ini wajib bertanggung jawab atas perusahaan itu pada pengurus PPII. Dalam urusan pengelolaan uang, maka perusahaan surat kabar itu terpisah dengan urusan uang badan pertalian. Pengurus PPII harus menyokong kas surat kabar dan banyaknya harus ditetapkan. Tempat terbit surat kabar adalah menurut tempat kedudukan Pengurus harian PPII. Sidang Pengarang harus terdiri dari 5 orang yang dipilih oleh pengurus harian. Sidang Pengarang wajib membuat laporan tentang keadaan surat kabar itu kepada kongres. Sidang Pengarang tidak mempunyai hak suara dan hak mengajukan usul, kecuali dalam hal surat kabar. Surat kabar dari Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia adalah bernama ISTERI,²³ terbit mingguan dan dalam penulisan artikelnnya tidak diperbolehkan memakai bahasa Belanda; larangan ini mengikuti Sumpah Pemuda 1928.²⁴

²² “Anggaran Dasar dan anggaran Roemah Tangga dari P.P.I.I., Anggaran Roemah Tangga., “*Isteri*, (1933), hal. 99

²³ *Ibid*, hal 102

²⁴ Cora Vreede De Stuers, *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan & Pencapaian*. (Jakarta,2008), hal. 136

Dalam rangka usaha PPII untuk meningkatkan pendidikan dikalangan masyarakat Indonesia, maka PPII mengadakan *studiefonds* (beasiswa) bagi anak-anak. Bertujuan untuk membantu anak-anak gadis yang tidak mampu membayar biaya sekolahnya. *Studiefonds* ini bernama Seri Derma²⁵ yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1933, kantor pusat Seri Derma berada di tempat kedudukan pengurus harian PPII.

II.3 Garis besar peristiwa Kongres Perempuan Indonesia I dan kongres-kongres yang diadakan PPPI/PPII setelah KPI I

a. Kongres Perempuan Indonesia I

Pada tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda mengadakan kongresnya yang kedua, dalam kongres itu diikrarkan Sumpah Pemuda. Kemudian pada setiap tanggal 28 Oktober kita memperingatinya sebagai Hari Sumpah Pemuda, karena pada tanggal tersebut para pemuda bersatu padu berikrar untuk mencapai kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, ikrar Sumpah Pemuda yang berisi tentang bertanah air satu, berbangsa, dan berbahasa satu yaitu Indonesia, bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Hal inilah yang membuat R.A. Soejatin, Ny. R.A. Soekonto dan Nyi Hadjar Dewantara berinisiatif untuk mengadakan suatu acara, mengundang perkumpulan-perkumpulan perempuan yang bertujuan mempererat tali persaudaraan diantara kalangan perempuan. Kemudian mereka bertiga membuat surat undangan kepada perkumpulan-perkumpulan perempuan yang berada di Yogyakarta, yaitu Poetri Indonesia, Wanita Utomo, Wanita Katholik, Wanita Mulyo, Wanita Taman Siswa, Sarekat Islam Wanita, Jong Java Wanita, Muhammadiyah Wanita dan Jong Islamieten Bond Dames Afdeling.²⁶

Kemudian para perwakilan dari perkumpulan-perkumpulan perempuan ini mengadakan pertemuan di rumah Nyonya Soekonto, mereka berunding bagaimana caranya agar organisasi-organisasi perempuan diseluruh Indonesia dapat bertemu untuk membahas masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan

²⁵ Lihat lampiran, mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga *Stichting* (Yayasan) Seri Derma. KOWANI, op. cit., hal. 59

²⁶ Marwati Djoened Poesponegoro, op. cit., hal. 418. KOWANI, op. cit. hal. 58

pada saat itu yaitu masalah untuk memperbaiki kedudukan kaum perempuan Indonesia.

Nyonya Soekonto kemudian membuat surat undangan yang disebar ke perkumpulan-perkumpulan perempuan dan juga ke organisasi-organisasi laki-laki. Mereka semua diundang ke Yogyakarta untuk menghadiri kongres tersebut. Dalam surat undangan itu telah disebutkan tanggal dan tempat terselenggaranya pertemuan, yaitu pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Pendopo Joyodipoeran, Yogyakarta.

Kongres yang diharapkan dapat menghasilkan buah pikiran untuk memajukan kaum perempuan Indonesia ini dihadiri oleh perwakilan dari perkumpulan-perkumpulan perempuan, antara lain dari Wanita Utomo, Aisyijah, Poetri Indonesia, Wanita Katholik, Wanita Taman Siswa, Sarekat Islam Wanita, dan Jong Islamieten Bond Dames Afdeling. Kongres ini dihadiri oleh perkumpulan-perkumpulan yang berasal dari pulau Jawa, tetapi bukan berarti kongres ini hanya dikhususkan untuk orang Jawa saja. Ny. Soekanto juga mengirimkan undangan kepada perkumpulan-perkumpulan perempuan di luar pulau Jawa. Perkumpulan-perkumpulan perempuan yang berada di luar pulau Jawa itu tidak hadir dikarenakan transport yang masih sulit.²⁷

Susunan pengurus kongres tersebut adalah:

Ketua	: Ny. R.A. Soekonto (Wanita Utomo)
Wakil ketua	: Siti Moendjiah (Aisyijah)
Sekretaris I	: Siti Soekaptinah (JIBDA)
Sekretaris II	: Soenarjati (Poetri Indonesia)
Bendahara I	: Ny. Hardjodiningrat (Wanita Katholik)
Bendahara II	: R.A. Soejatin (Poetri Indonesia)
Anggota pengurus	: Nyi Hadjar Dewantara (Wanita Taman Siswa) ²⁸

Setelah mendapatkan susunan pengurus, maka barulah dicarikan nama yang cocok untuk pertemuan ini, lalu disepakatilah untuk memberi nama Kongres Perempuan Indonesia I.²⁹ Tujuan diadakannya Kongres Perempuan Indonesia I ini

²⁷ Misalkan, untuk datang dari pulau Sumatera dengan mempergunakan Kapal Laut bisa memakan waktu kurang lebih selama 2 bulan.

²⁸ KOWANI, Op. Cit., hal. 60, Marwati Djoened Poesponegoro, Op. Cit., hal. 421

²⁹ Penamaan ini berdasarkan atas, karena merupakan pertemuan kaum perempuan, dan yang pertama dikarenakan masih akan ada lagi pertemuan atau kongres-kongres selanjutnya.

adalah mempersatukan cita-cita dan berusaha untuk memajukan perempuan Indonesia, mempererat hubungan antar perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia yang ada, membicarakan soal-soal kewajiban dan kepentingan perempuan. Hal-hal yang dibicarakan dalam Kongres Perempuan Indonesia I ini adalah mengenai masalah pendidikan bagi anak perempuan dan juga membahas tentang poligami. Putusan-putusan yang didapat dari Kongres Perempuan Indonesia I itu adalah:

1. Mendirikan badan federasi bersama “Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia” (PPPI).
2. Menerbitkan surat kabar, yang redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPPI; anggota-anggotanya terdiri dari Nyi Hadjar Dewantara, Nn. Hadjinah, Ny. Ali Sastroamidjojo, Nn. Ismoediati, Nn. Budiah dan Nn. Soenaryati.
3. Mendirikan *studiefonds* yang akan menolong gadis-gadis yang tidak mampu.
4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri.
5. Mencegah perkawinan anak-anak.
6. Mengirimkan mosi kepada pemerintah agar:
 - a. Secepatnya mengadakan *fonds* (dana) bagi janda dan anak-anak.
 - b. Tunjangan bersifat *onderstand* (pensiun) jangan dicabut.
 - c. Sekolah-sekolah putri diperbanyak.
7. Mengirimkan mosi kepada *Raad* (pengadilan) Agama agar setiap thalak dikuatkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama.³⁰

b. Kongres-kongres PPII

1. Kongres PPPI tahun 1929 di Jakarta

Kongres ini diadakan di Jakarta pada tanggal 28-31 Desember 1929, sebagai pimpinan kongres yaitu Nyonya R.A. Soekanto. Maksud dan tujuan diadakannya kongres ini adalah sama seperti Kongres Perempuan Indonesia I, yaitu mempersatukan cita-cita dan berusaha untuk memajukan perempuan Indonesia, mempererat hubungan antar perkumpulan-perkumpulan perempuan

³⁰ Ibid, hal 59.

Indonesia yang ada, membicarakan soal-soal kewajiban dan kepentingan perempuan.

Putusan-putusan kongres ini adalah adanya perubahan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga, antara lain: berubahnya nama dari badan federasi ini, yang tadinya Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) diganti menjadi Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (PPII),³¹ *Studiefonds* PPII bernama Seri Derma, Surat kabar ISTERI diterbitkan di Jakarta, dan lain sebagainya.³²

2. Kongres PPII tahun 1930 di Surabaya

Kongres ini diadakan di Surabaya pada tanggal 13-18 Desember 1930. Mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadikan PPII sebagai gabungan perkumpulan perempuan Indonesia, memperbaiki kedudukan serta menjunjung tinggi derajat kaum perempuan semuanya, PPII mempunyai asas yang berdasarkan kebangsaan, tidak berasaskan agama atau politik.

Hal-hal yang diputuskan dalam kongres kali ini antara lain adalah mengenai dibentuknya Badan Perantara, badan ini merupakan kepanjangan tangan dari PPII di masing-masing daerah anggota. Mempunyai tugas selain menjadi perantara antara PPII dan anggota, badan ini juga bertugas mempelajari tentang hak pilih dan memilih, memajukan kinerja Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak, dan lain sebagainya. Dalam kongres ini juga memutuskan untuk mengirimkan perwakilan ke *All Asian Women Conference* di Lahore pada bulan Januari 1931. Perwakilan yang terpilih adalah Ny. Soenaryati (Ny. Soekemi) dan Ny. R.A. Roekmini Santoso (adik dari R.A. Kartini).³³

3. Kongres PPII tahun 1932 di Surakarta, Solo

Kongres ini diadakan di Surakarta, Solo pada tanggal 25-29 Maret 1932 dengan pimpinan kongres Nyonya Moestadjab. Putusan-putusan kongres, antara

³¹ Susan Blackburn. *Kongres Perempuan Pertama, Tinjauan Ulang*. (Jakarta, 2007), hal. xviii

³² Lihat lampiran Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga P.P.I.I. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Op. Cit., hal. 62

³³ "Verslag Konggres P.P.I.I. II di Surabaya, 13-18 Desember 1930", "Isteri", (Februari 1931), hal.3-16. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta, 1986), hal. 64

lain: membentuk Komisi Fusi yang bertugas untuk menyatukan perkumpulan-perkumpulan perempuan yang mempunyai arah pergerakan yang sama. Pada tanggal 25-26 Juni 1932 di Mataram, Yogyakarta, diadakan konferensi antar anggota PPII yang haluannya sama. Dalam konferensi ini, perkumpulan-perkumpulan perempuan yang hadir sepakat untuk mendirikan Badan Fusi dan terbentuklah Isteri Indonesia. Perkumpulan ini berasaskan kebangsaan, kerakyatan, kenetralan terhadap agama dan tujuannya adalah Indonesia Raya.³⁴

4. Kongres PPII tahun 1933 di Jakarta

Kongres ini diadakan di Jakarta pada tanggal 6-8 Mei 1933 dengan pimpinan Ny Soewandi. Keputusan-keputusan pada kongres kali ini adalah memilih pengurus PPII yang baru, memutuskan tidak akan mengadakan kongres PPII lagi tetapi akan mengambil inisiatif untuk mengadakan Kongres Perempuan Indonesia II, hal ini dikarenakan banyaknya perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia yang belum menggabungkan dirinya ke dalam PPII untuk bersama-sama menyatukan tenaga dan pemikiran dalam rangka perbaikan nasib rakyat Indonesia pada umumnya dan kaum perempuan Indonesia pada khususnya. Keputusan yang lain adalah mengadakan persiapan-persiapan menjelang diadakannya Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta, yang merupakan kelanjutan dari Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta.³⁵

³⁴ “Pemandangan Oemoem dari Konggres P.P.I.I. III,“ *Isteri*, (Desember, Januari, Februari 1931-1932), hal.2-8. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta, 1986), hal. 66

³⁵ “Kerapatan Besar P.P.I.I. jang ke IV dari 6 Mei sampai 8 Mei ’33,“ *Isteri*, (1933), hal.6-11. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta, 1986), hal. 68

BAB III

KONGRES PEREMPUAN INDONESIA YANG KE II

DI JAKARTA, 20-24 JULI 1935

III. 1. Persiapan Kongres Perempuan Indonesia II

Persiapan Kongres Perempuan Indonesia II, ditandai dengan adanya Maklumat atau surat seruan untuk berkongres yang dikeluarkan oleh Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Pengurus Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia telah menyiarkan suatu surat seruan yang ditujukan kepada seluruh Kaum Ibu Indonesia untuk melaksanakan Kongres Perempuan Indonesia yang ke II.

Maklumat ini mempunyai isi sebagaimana tersebut dibawah ini:

Saudara-saudara Kaoem Iboe Indonesia!

Kemajoean tanah air dan bangsa Indonesia hanya bisa lekas tertjapai, djika Kaoem Iboe toeroet mengoesahakannya. Kaoem Iboe dan Kaoem Bapak berjajar sama-sama bekerja dengan sadar, masing-masing dengan tjara dan pada lapangan jang selaras dengan chodratnja. Kaoem Iboe dan Kaoem Bapak bekerdja bersama-sama dengan melaloei garis-garis perdjalanannja sendiri, tetapi menoejoe maksoed jang satoe, kemadjoean tanah air dan bangsa!

Kaoem Iboe Indonesia, insafkah kita akan kewadjiban itoe?

Tahoekah kamoe, betapa pentingnja tempat Kaoem Iboe dalam perdjalanannja kemajoean bangsa?

Tiap-tiap hari kita menghadapi pekerdjaan kita didalam roemah tangga. Saban hari kita berhubungan dengan anak-anak kita, pengharapan kita. Sewaktoe-waktoe kita bercampur-gaul dengan perempoean-perempoean jang sebangsa. Dengan tiada berhentinja kita toeroet mengalami, bagaimana koerangnja kemajoean dan betapa soesahnja penghidoepan bangsa kita.

Tentoe jang kita ingin dalam tiap-tiap hal jang terseboet diatas mempoenjai pendirian jang sehat, jang baik, jang moelia. Pendirian jang moelia itoe akan kita dapat, djika kita masing-masing telah mendapat *Keinsafan sebagai Iboe Bangsa Indonesia*.³⁶

Karena “Keinsafan Iboe Bangsa” itoelah pekerdjaan kita dalam rumah tangga akan djadi pekerdjaan jang berderadjaat tinggi, anak-anak kita kemoedian akan meroepakan bangsa Indonesia jang baroe, jang lebih koeat dan moelia dari pada bangsa kita sekarang

³⁶ Mengetahui kewajiban seorang perempuan, dalam peranannya mendidik anak, karena baik dan buruknya generasi penerus bangsa yang akan datang tergantung dari didikan seorang Ibu.

ini; pergaoelan kita sekaoem akan mendjadi soember kemajoean kita, kaoem perempoean Indonesia; pengalaman kita atas keadaan bangsa akan mendjadi pendorong soepaya toeroet mentjepatkan kemadjoean dan memperbaiki penghidoepan bangsa.

Karena “Keinsafan Iboe Bangsa” itoelah hidoep kita, Perempoean Indoesia, akan bertambah artinja, serta bertambah pentingnja, baik dalam roemah tangga, maoepoen dalam masjarakat.

Kesempatan sebaik-baiknya membangoenkan “Keinsafan Iboe Bangsa” itoe adalah dengan mengadakan suatoe Kongres Perempoean Indonesia. dengan itoe, maka atas inisiatif P.P.I.I. (Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia) sekarang di Jakarta telah berdiri soeatoe Komite Kongres Perempoean Indonesia jang kedoea. Komite itoe terdiri atas isteri-isteri jang terkenal, seperti: Nyonya Margono (Ketoea), Nyonya Parma Iskandar (Wakil Ketoea), Nyonya Soekamto (Panitera/secretaresse)

Badan pengawasan dalam oeroesan oelang terdiri atas: 1. Nyonya Koesoemo Oetojo, 2. Nyonya Thamrin dan 3. Nyonya Mochtar Praboe Mangkoenegoro.

Kongres Perempoean Indonesia jang kedoea ini akan dilangsungkan di Djakarta (Batavia Centrum) pada boelan pertengahan tahoen 1935 ini. Pembicaraan-pembicaraan jang akan diadakan adalah ditoejoekan kepada Perbaikan keadaan Roemah Tangga dan Masyarakat Indonesia. Dengan djalan demikian akan timboellah pada kita “Keinsafan Iboe Bangsa” jang membawa arti bahwa Kaoem Iboe Indonesia sekarang ini toeroet menanggoeng jawab atas baik dan boesoeknja bangsa Indonesia jang akan datang. Agar soepaya sifat Kongres bisa sebaik-baiknya dan bersifat umum se-Indonesia, maka pimpinan Kongres diserahkan pada suatu badan Pengoeroes Kongres Perempoean Indonesia jang ke II, terdiri atas beberapa orang jang tinggal di Djakarta dan dipilih oleh perkoempoelan-perkoempoelan jang toeroet berkongres.³⁷

Dalam surat undangan tersebut, telah ditetapkan hari dan tanggal untuk mengadakan kongres seperti pada tahun 1928, yaitu Kongres Perempuan Indonesia II. Kongres tersebut diadakan di Gedung Permufakatan, Gang Kenari, sekarang menjadi Jalan Kenari II/15, Senen, Jakarta Pusat³⁸, pada tanggal 20-24

³⁷ Pedoman Isteri, Maret 1935 No.3 tahun ke-4, hal 50-51

³⁸ Pada awal pembangunannya pada abad ke-20, Pemerintah Kolonial mengembangkan prasarana kota Batavia dengan membangun gedung-gedung untuk rumah tinggal, salah satunya termasuk bangunan yang kemudian dibeli oleh Mohammad Hoesni Thamrin dan dihibahkan untuk kegiatan Pergerakan Nasional Indonesia kepada P3KI (Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) untuk menuju Kemerdekaan pada saat pra kemerdekaan Indonesia, maka gedung ini dinamakan Gedung Permufakatan. Saat itu aktivitas pergerakan pra kemerdekaan RI salah satunya dipusatkan digedung ini, bahkan konsep-konsep sumpah pemuda dibicarakan di sini, tak hanya itu di sini juga sering dilakukan rapat-rapat pergerakan Nasional, seperti Kongres Perempuan Indonesia II.

Juli 1935 di Jakarta. Kongres ini disebut dengan Kongres Perempuan Indonesia II, karena kongres ini merupakan kelanjutan dari usaha kaum perempuan pada waktu itu untuk mempererat tali silaturahmi antar perkumpulan-perkumpulan perempuan yang berada di wilayah Indonesia untuk memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia dan rakyat Indonesia pada umumnya.³⁹ Dengan adanya tali persaudaraan ini maka akan tersusun kekuatan perempuan untuk menyadarkan peranan kaum ibu yang sangat penting dalam merubah keadaan Bangsa⁴⁰.

Setelah surat-surat seruan dan ajakan dari PPII untuk menyelenggarakan suatu Kongres kembali seperti pada tahun 1928 disiarkan kepada perkumpulan-perkumpulan perempuan di seluruh Indonesia, dapat dilihat respon yang baik dari para perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia, hal ini terlihat dari surat-surat balasan yang masuk ke sekretariat PPII.

Dikarenakan PPII tidak bisa mengetahui semua alamat perkumpulan perempuan di Indonesia, maka jika ada perkumpulan perempuan yang belum mendapatkan surat pemberitahuan dan ajakan dari PPII, maklumat/surat seruan tersebut dijadikan sebagai surat pemberitahuan untuk turut serta mengikuti Kongres Perempuan Indonesia II. PPII meyakini dengan adanya surat seruan ini, akan banyak perkumpulan-perkumpulan perempuan yang akan mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Kongres Perempuan Indonesia II.

Perkumpulan yang turut serta dalam pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia II ini, hanya akan menjadi anggota Kongres saja, mereka tidak diwajibkan menjadi anggota PPII. Perkumpulan yang akan ikut serta dalam kongres diminta agar mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Sekretaris Pengurus Kongres, yang beralamat di Gang Sawo No. 13, Kemayoran, Batavia Centrum (Jakarta).

Setiap permintaan untuk menjadi anggota Kongres disertai *Statuten* dan *Huishoudelijk Reglement* (Aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) perkumpulannya atau jika belum tersedia, maka menyerahkan *Werkprogram*

³⁹Banyak perkumpulan-perkumpulan perempuan yang terbentuk diluar Jawa yang belum mengikuti Kongres Perempuan Indonesia I karena terhalang oleh sarana transportasi yang tidak memungkinkan, maka dari itu salah satu tujuan diadakannya Kongres Perempuan Indonesia II ini adalah mempererat tali silaturahmi antar perkumpulan-perkumpulan perempuan di seluruh wilayah Indonesia.

⁴⁰“Kongres Perempuan Indonesia yang ke II,” *Bintang Timoer*, (22 Juli 1935), hal. 2

(program kerja) saja. Maklumat atau surat seruan ini ditanda tangani oleh Nyonya Sri Mangoensarkoro dan Nyonya Badingoedjaman, masing-masing bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia.

Pengurus Kongres terdiri atas:

Ketua : Nyonya Sri Mangoensarkoro
 Wakil Ketua : Nyonya Soewarni Pringgodigdo
 Sekretaris I : Nyonya Moehamad Roem
 Sekretaris II : Nona Soehariah
 Bendahara : Nyonya Soeparto
 dan lain-lain sebagai pembantu.

Adapun perkumpulan-perkumpulan yang menjadi anggota Kongres itu ialah:

1. Kaoem Iboe Tuban
2. Mardi Poeteri Pematang
3. Pasoendan Isteri Bandung
4. Sarekat Poeteri Islam Makasar
5. Perkoempoelan Roekun Isteri Tangerang
6. Permi bagian Poeteri Padang
7. Persatoean Isteri Andalas Bandung
8. Isteri Sedar Mataram
9. Wanita Taman Siswa Mataram
10. Persaudaraan Isteri Bandung
11. Kemadjoean Isteri Jakarta
12. Isteri Indonesia Jakarta
13. Wanita Oetomo Mataram
14. Poeteri Boedi Sedjati Surabaya
15. Santjojo Rini Solo
16. Persatoean Poeteri Indonesia Surabaya
17. Aisijah Mataram
18. Dharmo Laksmi Salatiga
19. Kaoetamaan Isteri Medan
20. Waniti Kentjono Banjarnegara
21. Seri Derma Solo

22. Partai Sarekat Islam Indonesia Bagian Isteri, Garut

23. Wanita Sejati, Bandung

24. PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya), Manado

Jumlah peserta ini ditambah juga dari Komite gabungan guru-guru sekolah Islam Perempuan dan sekolah Diniyah Padang Panjang.⁴¹

Melihat Perkumpulan-perkumpulan Perempuan yang datang pada Kongres Perempuan Indonesia II berasal dari kota-kota besar, maka disimpulkan bahwa pendidikan atau keterbukaan pikiran terhadap nasib kaum Perempuan pada waktu itu baru dirasakan pada kalangan atas saja. Dengan adanya Kongres ini, dapat membantu Perkumpulan-perkumpulan Perempuan tersebut untuk bersama-sama memikirkan perbaikan kehidupan kaum Perempuan Indonesia seumumnya, baik untuk kalangan atas maupun untuk kalangan bawah.

Dengan adanya surat pemberitahuan ini dan respon yang didapat, maka kita dapat mengetahui antusiasme para perkumpulan-perkumpulan perempuan Indonesia dalam usahanya memperbaiki kehidupan kaum perempuan.

Diharapkan juga dengan adanya Kongres Perempuan Indonesia II ini, masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan pada waktu itu berkurang. Para perkumpulan-perkumpulan perempuan yang menghadiri kongres memberikan solusi atas permasalahan yang ada, seperti pemberantasan buta huruf, masalah perkawinan, buruh, dan lain sebagainya.

Berikut adalah para penganjur dan pengurus Kongres serta nama-nama isteri-isteri yang akan berpidato pada Kongres Perempuan Indonesia II dan tema yang akan dibicarakannya.

Badan-badan Kongres

I. Pengurus Kongres :

Ketua : Ny. Sri Mangoensarkoro (Wanita Taman Siswa)

Wakil Ketua : Ny. Soewarni Pringgodigdo (Isteri Sedar)

Sekretaris I : Ny. Markisah Dahlia Moh. Roem (Luar perkumpulan)

Sekretaris II : Nn. Soehariah (Kepoeterian Indonesia Moeda)

⁴¹ "Kongres Perempoean Indonesia jang ke II," *Pedoman Isteri*, (Maret 1935), hal 51. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*, (Jakarta, 1986), hal. 73

Bendahara : Ny. Soeparto (Isteri Indonesia)
 Anggota-anggota : Ny. Wiria Atmadja (Pasoendan)
 Ny. Hardjono (Isteri Indonesia)
 Nn. Soehara (Pasoendan Isteri)
 Nn. Badariah (Isteri Sedar)
 Ny. Sardjono (Aisijah)
 Ny. Kasman (Jong Islamieten Bond, Dames Afdeeling)
 Ny. Mahadi Arif (Jong Islamieten Bond, Dames
 Afdeeling)
 Ny. Winoto (Luar perkumpulan)
 Nn. Soerjati (Wanita Taman Siswa)

II. Panitia Besar Kongres :

Ketua I : Ny. Abdurrachman
 Ketua II : Ny. Sidhito
 Wakil Ketua : Ny. Parma Iskandar
 Sekretaris I : Ny. Soekamto
 Sekretaris II : Ny. Moetinah
 Bendahara I : Ny. Koesno
 Bendahara II : Ny. Wiria Atmadja
 Anggota-anggota : Ny. Sardjono
 Ny. Dachlan Abdoellah
 Ny. Kayadoe
 Ny. Rachman Tamin
 Ny. S. Soewandi
 Ny. Alim
 Ny. S. Goenawan
 Ny. Sri Mangoensarkoro
 Ny. Badingoedjaman
 Ny. Margono
 Ny. Sarpan
 Nn. Soehara

Badan Pengawas Keuangan :

1. Ny. Koesoemo Oetojo
2. Ny. Thamrin
3. Ny. Mochtar Praboe Mangkoenegoro⁴²

Hal-hal yang akan dibicarakan dalam Kongres menyangkut permasalahan yang dihadapi kaum perempuan pada waktu itu⁴³, adalah:

1. Pemberantasan buta huruf sebagai syarat kemajuan kebangsaan, oleh Ny. Soejatien Kartowijono
2. Nasib dan keadaan kaum perempuan Indonesia di dalam masyarakat dan rumah tangga pada saat zaman malaise/krisis, oleh Ny. Soemadi
3. Kedudukan perempuan dalam hukum Islam, Ny. Siti Hajinah
4. Kaum buruh perempuan Indonesia, oleh Ny. Soewarni Pringgodigdo
5. Arti pemuda dalam pergerakan perempuan Indonesia, oleh Ny. Emma Poeradiredja
6. Arti perempuan Indonesia sebagai “Ibu Bangsa”, oleh Ny. Sri Mangoensarkoro.

III. 2 Jalannya Kongres Perempuan Indonesia II

Kongres berlangsung dari tanggal 20-24 Juli 1935 di Gedung Permufakatan, kongres dihadiri kurang lebih 2500 orang.⁴⁴ Kongres Perempuan Indonesia II dihadiri oleh perkumpulan-perkumpulan perempuan dari berbagai daerah di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pakaian khas daerah masing-masing yang dikenakan oleh para perempuan tersebut. Dengan berbagai macam model pakaian dan warna serta corak yang ditampilkan, menggambarkan ciri khas dari daerahnya masing-masing. Kebaya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Baju kurung dan kerudung dari Sumatera⁴⁵.

Kongres dibuka pada hari sabtu, tanggal 20 Juli 1935 pada pukul 08.15 WIB oleh Ketua Komite, yaitu Nyonya Abdurrahman. Para tamu dan perwakilan

⁴² “Kongres Perempoean Indonesia jang ke II,” *Pedoman Isteri*, (Maret 1935), hal 86

⁴³ *Ibid*, hal 87

⁴⁴ *Pemandangan*, (20 Juli 1935)

⁴⁵ *Bintang Timoer*, Op. Cit, hal 1

dari berbagai macam golongan dan perkumpulan telah hadir untuk mengikuti jalannya Kongres Perempuan Indonesia II, diantaranya adalah perwakilan dari *Volksraad*⁴⁶ yaitu, M.H. Thamrin dan Ratulangi, dr. Soeratmo, Mr. Hadi, Tuan Alim, dr. Moewardi. Juga dihadiri oleh perwakilan perkumpulan perempuan, diantaranya Pengurus Besar Permi, Madjelis Idarah Puteri Padang Pandjang, dan juga perwakilan dari perkumpulan-perkumpulan politik, agama, olahraga, pers dan juga perwakilan dari pemerintah.⁴⁷

Nyonya Abdurrahman memberikan kata sambutan, setelah sebelumnya memberikan ucapan terimakasih kepada tamu dan para perwakilan yang telah hadir di dalam Kongres. Sambutan itu berisi tentang bagaimana solidnya kinerja dari para perempuan yang tergabung dalam Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia, sebagai organisasi perempuan yang menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia II. Serta menyampaikan tentang emansipasi perempuan, yaitu kedudukan perempuan tidak lebih rendah maupun lebih tinggi dari kaum laki-laki, tetapi berjalan beriringan. Nyonya Abdurrahman juga menyampaikan harapannya kepada insan pers yang meliput jalannya Kongres, agar mempublikasikan jalannya Kongres secara objektif dan menyeluruh.

Setelah sambutan dari Ketua Komite, dilanjutkan pidato pembukaan dari Ketua Kongres Perempuan Indonesia II, yaitu Nyonya Sri Mangoensarkoro. Beliau menyampaikan bagaimana seharusnya arah pergerakan kaum perempuan dalam usahanya memperbaiki nasib kaum perempuan dan kewajiban atas keterlibatan kaum perempuan dalam perjuangan kebangsaan.

Setelah pidato pembukaan dari Nyonya Sri Mangoensarkoro diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya, yang menambah semangat perkumpulan Perempuan dan peserta Kongres lainnya. Dilanjutkan dengan pengumuman tentang telegram yang masuk yang menunjukkan dukungannya atas terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia II, telegram tersebut diantaranya berasal dari; Susuhunan, Sultan Yogyakarta, Mangkunagaran, Surat dari Kaum Ibu Den Hag, Perhimpunan Indonesia dan Perhimpunan Kaum Ibu Paris. Untuk para perwakilan yang datang menghadiri Kongres Perempuan Indonesia II, diberikan kesempatan berpidato dan mengungkapkan pemikirannya. Setelah itu

⁴⁶ Dewan Perwakilan Rakyat pada masa Kolonial.

⁴⁷ *Pemandangan*, (22 Juli 1935), hal 2

barulah ditampilkan pertunjukan-pertunjukan kesenian dari berbagai daerah; Panembrama⁴⁸, Tari Piring oleh anak-anak, nyanyian Sunda oleh Nyi R. Hadji Djoelaeha, Tari Serimpi oleh anak-anak, Keroncong dan Tari Kiprah. Maka pada pukul 11.45 selesailah acara pembukaan Kongres Perempuan Indonesia II.⁴⁹

Rapat Umum Pertama

Pada pukul 09.00 WIB, rapat umum pertama dibuka oleh Ketua Kongres, Nyonya Sri Mangoensarkoro, pada rapat umum ini diperkirakan dihadiri oleh 1500 orang, waki P.I.D., dan pers.⁵⁰ Pada rapat umum pertama ini dibicarakan tentang *Voorloopige Grondbeginselen* (dasar utama sementara), sebagai arah pembahasan dalam Kongres Perempuan Indonesia II.

Dasar utama sementara itu yaitu;

1. Rasa Nasionalisme yang berdasarkan kemanusiaan.

Perjuangan pergerakan yang memikirkan nasib dari bangsa Indonesia secara umum dan kaum perempuan Indonesia khususnya, agar mendapatkan kebebasan, merdeka dari penjajahan.

2. Kesosialan.

Di Indonesia mempunyai banyak perkumpulan-perkumpulan dan perkumpulan-perkumpulan ini mempunyai haluan perjuangannya sendiri-sendiri, hal ini harus dihormati dan dihargai. Dari perbedaan tersebut, ada satu persamaan yaitu semua perkumpulan mempunyai agenda dalam perjuangannya yang berhubungan dengan kesosialan. Maka dalam Kongres Perempuan Indonesia II ini, pembicaraan yang berhubungan dengan agama dan politik dibatasi. Jika ada pembahasan yang bersangkutan dengan agama dan politik, maka pembahasan itu harus memakai sudut pandang kesosialannya saja.

3. Kenetralan

Kongres Perempuan Indonesia II menghormati haluan pergerakan setiap perkumpulan perempuan yang ada, jika ada suatu putusan yang prinsip maka harus mendapatkan keputusan yang bulat. Misalnya, jika mengadakan suatu aksi, maka aksi tersebut tidak boleh memakai atribut⁵¹ keagamaan dan politik, tetapi

⁴⁸ Nyanyian atau tembang penghormatan untuk menyambut kedatangan tamu atau rapat besar.

⁴⁹ "Kongres Perempoean Indonesia jang ke II," *Bintang Timoer*, (22 Juli 1935)

⁵⁰ *Pemandangan*, Op Cit, hal 2

⁵¹ Atribut lebih diartikan sebagai suatu sudut pandang dalam mengemukakan pendapat pada saat berorasi di tempat berlangsungnya aksi tersebut.

yang bersifat sosial saja. Diluar kegiatan Kongres, maka setiap perkumpulan berhak mengadakan kegiatan masing-masing sesuai dengan haluannya.

4. Keperempuanan

Maksud dari kata keperempuanan adalah membuka jalan bagi para kaum perempuan menuju arah kemajuan dan menjalankan kewajibannya sebagai “Ibu Bangsa”.⁵²

Semangat yang ada dalam pergerakan kaum perempuan pada waktu itu adalah semangat kemerdekaan yang didasarkan kepada kodrat kaum perempuan, masing-masing keluarga menjadi dasar dari nilai-nilai keluhuran bangsa.

Pada rapat umum hari pertama ini diisi dengan pidato-pidato dari para perwakilan perkumpulan-perkumpulan perempuan yang membawa tema masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Nyonya Soekirso dari perkumpulan Santjojo Rini berpidato mengenai “Pemberantasan buta huruf”, maksud dan tujuan dari adanya pemberantasan buta huruf ini adalah memajukan pengetahuan rakyat Indonesia dalam hal membaca dan menulis. Diharapkan dengan banyaknya pengetahuan yang didapat, bisa memajukan bangsa Indonesia, bebas merdeka baik secara lahiriah maupun secara batiniah.

Pidato selanjutnya dibawakan oleh Nyonya Emma Poeradiredja perwakilan dari Pasoendan Isteri yaitu mengenai “Arti pemuda dalam pergerakan kaum perempuan Indonesia”. Pemuda merupakan generasi penerus bangsa dan pemikul martabat bangsa, maka dari itu kaum ibu harus lebih memperhatikan pendidikan dari kaum muda tersebut. Pukul 11.45, Nyonya Soewarni Pringgodigdo dari perkumpulan Isteri Sedar mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang “Kaum Buruh Perempuan Indonesia”, pendapat tentang pekerjaan di luar rumah bagi sebagian golongan pada waktu itu dipandang tidak halal buat kaum perempuan. Hal ini disebabkan oleh pandangan kesusilaan yang memandang rendah pekerjaan itu, pandangan ini berasal dari golongan atas. Tetapi pandangan tersebut mulai menghilang, dikarenakan adanya kemajuan zaman, adanya sekolah-sekolah membuka pikiran untuk memperbaiki kehidupannya. Pada tahun 1912 dibuka sekolah Kartini pertama di Semarang, setelah itu bermunculanlah sekolah-sekolah putri dari cabang sekolah Kartini di Jakarta (1913), Madiun

⁵²*Bintang Timoer*, Op Cit, hal 2

(1914), Malang dan Cirebon (1916),⁵³ ataupun sekolah-sekolah puteri lainnya, misalnya Sekolah Kautamaan Isteri di beberapa tempat di Priangan, dan lain sebagainya.

Maka dari itu kewajiban dari pergerakan perempuan terhadap pekerjaan perempuan bukan hanya sekedar untuk mempropaganda merdekanya perempuan untuk bekerja, akan tetapi:

- a. Untuk melebarkan lapangan pekerjaan untuk kaum perempuan dan menjaga agar jangan sampai kesempatan itu tertutup baginya,
- b. Menambah kesempatan-kesempatan untuk kaum perempuan agar dapat mengasah kemampuannya untuk bekerja,
- c. Mendapatkan aturan-aturan pekerjaan yang baik dan adil baginya,
- d. Memajukan sarakat-sarakat pekerja perempuan.

Dengan berakhirnya pidato dari perwakilan Isteri Sedar ini, maka pada pukul 14.00 rapat umum yang pertama selesai.⁵⁴

Rapat Umum Kedua

Pada malam harinya jam 20.00 diadakan rapat umum yang kedua Kongres Perempuan Indonesia II, gedung permufakatan ini di padati oleh para peserta, peserta ini dapat di bagi menjadi tiga bagian, yaitu,

1. Sepertiga kaum perempuan, wakil-wakil perkumpulan perempuan,
2. Pers,
3. PID, *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID = Dinas Polisi Rahasia).⁵⁵

Rapat umum yang kedua ini dibuka oleh Nyonya Soeparto yang merupakan bendahara pengurus Kongres. Kongres memberikan *verslag* (laporan) rapat umum pertama kepada para peserta Kongres yang tidak mengikuti rapat umum pertama.⁵⁶ Pembukaan dari Nyonya Soeparto berisi tentang tanggapan Kongres terhadap pemberitaan yang termuat didalam artikel utama surat kabar Pemandangan yang dibuat oleh Tuan Saeroen⁵⁷ yang menyebutkan bahwa

⁵³ SNI edisi mutakhir, Op. Cit., hal 404

⁵⁴ *Bintang Timoer*, Op Cit, hal 2

⁵⁵ "Kongres Perempuan Indonesia jang kedoea," *Pemandangan*, (23 Juli 1935), hal 2

⁵⁶ Peserta yang menghadiri Kongres Perempuan Indonesia II bertambah banyak dari rapat umum yang pertama.

⁵⁷ *Directeur Hofdredacteur* surat Kabar Pemandangan.

Kongres ini hanya dari satu lapisan saja. Kongres menolak anggapan tersebut.⁵⁸ Pidato dari Nyonya Soeparto ini juga sebagai pengingat pidato dari Nyonya Abdurrahman yang mengharapkan objektivitas dan menyeluruh terhadap pemberitaan pers yang meliput kegiatan Kongres Perempuan Indonesia II ini.

Kongres dilanjutkan dengan pembacaan laporan keuangan dari Nyonya Moechtar Praboe Mangkoenegoro yang merupakan anggota badan pengawas keuangan, anggota pengawas keuangan terdiri dari 3 orang, selain Nyonya Moechtar ada Nyonya Koesoemo Oetojo dan Nyonya Thamrin.

Pidato kemudian dilanjutkan oleh Nyonya Ratna Sari perwakilan dari Permi bagian Istri mengenai “Kedudukan kaum perempuan dalam hukum Islam”.

Pidato Nyonya Ratna Sari mempunyai isi sebagaimana tersebut dibawah ini:

Perempoean, yakni manoesia, sajak kiri dan teman pembantoe bagi laki-laki. Sabda Nabi Besar: Berboeat baiklah kepada perempoean, mereka ialah pembantoe (dirawikan oleh Boekhari dan Moeslim dari Aboe Hoerairah).

Sabda Nabi Besar : Perempoean ialah penolong (kawan) laki-laki (dirawikan oleh Imam Ahmad, Aboe Daoed dan Tirmidzi dari Aisyah r.a.)

Perkawinan ialah soennah Illahi dan kehendak kemanoesiaan. Selain oentoek beberapa kepentingan-kepentingan lain, teroetama sekali perkawinan disyari’atkan soepaja manoesia mempoenjai ketoeroenan dan keloearga jang sjah.

Sabda Toehan : Dan Kami djadikan kamoe berpasangan (Ar-Roem:21),

Islam membolehkan poligami antara lain-lain ialah oentoek menoetoep prostitoesi (perzinaan) dan prostitoesi menimboelkan keloearga dan ketoeroenan jang tidak sjah. Poligami boleh dengan syarat: si soemi sempat dan bisa berlakoe adil.

Sabda Toehan : Dan jika kamoe khawatir tiada berlakoe adil pada anak-anak jatim perempoean maka kawinilah perempoean (jang lain) jang baik boeatmoe : doea, tiga, empat, maka djika khawatir tiada berlakoe adil, beristeri seorang sadjalah (Nisa : 4)

Perceraian berasal dari krisis roemah tangga jang tidak dapat diperbaiki. Oentoek keloear dari krisis disediakan seboeah pintoe, ialah: Thalak (terpegang ditangan laki-laki). Dari pada mati dalam krisis, Islam lebih soeka pemeloeknja keloear dari krisis. Bila krisis telah lenjap soemi boleh kembali (roejoek) balik.

Sabda Nabi besar : Jang halal jang amat di moerkai Toehan ialah Thalak. Oentoek keloear dari perkawinan, kaoem perempoean

⁵⁸ Tidak disebutkan alasannya, tetapi dapat dilihat peserta yang hadir berasal dari perkumpulan-perkumpulan perempuan yang mempunyai arah pergerakan yang berbeda dan mempunyai pendukung yang berasal dari lapisan mana saja.

mempoenjai poela ditangannya Fasak dan Khoeloe' (minta cerai dengan mengembalikan mahar)

Perempoean adalah joeroe pendidik jang oetama, sebab merekalah jang memegang oeroesan jang penting dalam roemah tangga.

Sabda Nabi besar : Soerga itoe dibawah telapak kaki Iboe (HR. Anas)

Sabda Nabi Besar : Perempoean tiang negeri, apabila baik dia baiklah negeri, apabila binasa dia binasalah negeri.⁵⁹

Pandangan Islam terhadap kedudukan kaum Perempuan dengan kaum laki-laki tidaklah merendahkan. Tugas-tugas yang diamanahkan/diemban kepada Perempuan, merupakan hal yang mulia; sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya, mengurus semua keperluan keluarga, dan lain sebagainya.

Setelah Nyonya Ratna Sari menyampaikan pidatonya dan para peserta Kongres istirahat sejenak, maka tiba giliran dari Nyonya Sri Mangoensarkoro menyampaikan pidatonya mengenai "Arti perempuan sebagai Ibu Bangsa. Setiap manusia mempunyai kewajiban atas kodratnya masing-masing. Mempertahankan kelangsungan keturunannya. Dalam hal kewajiban, antara kaum perempuan dan laki-laki adalah berbeda, kaum perempuan memelihara dan mendidik keturunan tersebut sedangkan laki-laki mempunyai kewajiban membela dan menjaga keturunannya itu.

Dalam kewajiban perempuan itulah yang menjadi letak arti perempuan menjadi Ibu Bangsa. Perempuan Indonesia wajib menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa, yang teguh dan kuat, baik secara lahiriah maupun batiniah. Mencetak generasi yang siap mengorbankan diri dengan setulus hati untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Pidato dari Nyonya Sri Mangoensarkoro ini merupakan pidato penutup pada rapat umum yang kedua, rapat ini ditutup tepat pada pukul 12.00.

Rapat Umum Ketiga

Rapat umum yang ketiga ini merupakan rangkaian terakhir dari rapat umum Kongres Perempuan Indonesia II. Rapat terakhir ini mendapatkan perhatian yang besar, baik dari kaum perempuannya maupun dari kaum laki-lakinya. Rapat dibuka pada pukul 08.00 lewat oleh Nyonya Sri Mangoensarkoro

⁵⁹ "Kongres Perempuan Indonesia yang ke II, RAPAT OEMOEM KEDOEAE," *Bintang Timoer*, (23 Juli 1935), hal. 2

dengan pidato pembukaan yang menyatakan bahwa semangat dari Kongres ini berasal dari jiwa yang muda, masih segar. Para pembicara pemberi pidato pada Kongres Perempuan Indonesia II ini, pada saat Kongres yang pertama belum berkontribusi dalam hal pemikiran yang disampaikan di depan sidang di dalam Kongres pertama tersebut.

Setelah pidato pembukaan tersebut, maka dilanjutkan dengan pidato yang dibawakan oleh Nyonya Soemadi, yang bertemakan tentang “Nasib perempuan Indonesia dalam jaman Malaise (krisis)”

Perjuangan nasib yang dimaksud adalah memperjuangkan nasib rakyat jelata yang semakin sengsara dalam masa krisis ini. Penghasilan dari kaum laki-laki tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka kaum perempuan membantu dengan mencari kerja diluar rumah. PSII telah menyebarkan angket kepada lapisan masyarakat bawah yang mengalami kesengsaraan pada zaman krisis itu. Salah satu hasilnya adalah mengetahui makanan apa yang mereka makan sehari-hari, yaitu talas gatal dan ampas tahu, yang sebenarnya makanan itu bukanlah makanan untuk manusia melainkan untuk makanan ternak babi.⁶⁰ Disini terlihat betapa menderitanya masyarakat lapisan bawah pada zaman krisis tersebut.

Hal inilah yang harus menjadi perhatian penting dari kaum perempuan melalui Kongres Perempuan ini.⁶¹ Pada saat disinggung tentang betapa menderitanya bangsa Indonesia ini, Nyonya Soemadi mendapat teguran polisi dari pihak Belanda agar tidak memakai kata-kata yang kasar dalam menggambarkan penderitaan rakyat pada saat itu.⁶² Jika Nyonya Soemadi mendapatkan teguran satu kali lagi, maka Nyonya Soemadi tidak diizinkan melanjutkan pidatonya kembali. Tetapi hal itu tidak terjadi, dan Nonya Soemadi melanjutkan pidatonya

⁶⁰ “Congres Perempuan Jang ke II, RAPAT OEMOEM JANG KETIGA” *Bintang Timoer*, (24 Juli 1935), hal 1

⁶¹ Sangat disayangkan, dalam hasil-hasil keputusan dari Kongres Perempuan Indonesia II tidak dinyatakan secara formal dan langkah konkrit kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh kaum perempuan dalam mengatasi krisis ekonomi untuk lapisan masyarakat bawah ini. Tetapi di dalam Anggaran Dasar Perikatan Perkumpulan Isteri Indonesia (Organisasi yang menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia), hal yang menyangkut kesejahteraan perempuan termaktub di dalamnya.

⁶² Kongres Perempuan Indonesia II mendapatkan pengawasan dari pemerintah Belanda. Sama halnya dengan Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928, yang mendapat pengawasan dari *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID = Dinas Polisi Rahasia)

sampai dengan kesimpulan. Kaum perempuan di setiap wilayah harus sama-sama mengawasi akan kesejahteraan kaum perempuan di wilayahnya tersebut.

Pidato dari Nyonya Soemadi tersebut merupakan pidato terakhir dalam rangkaian acara Kongres Perempuan Indonesia II. Kemudian acara diambil alih oleh Nyonya Sri Mangoensarkoro. Sebagai ketua dari Kongres Perempuan Indonesia II, Nyonya Sri Mangoensarkoro pada saat itu mengumumkan telah ada kejadian yang cukup menyedihkan terjadi dalam jalannya Kongres kali ini, yaitu dengan keluarnya Nyonya Suwarni Pringgodigdo perwakilan dari Isteri Sedar dari Kongres Perempuan Indonesia II. Hal ini disebabkan oleh tidak sepakatnya pemahaman antara Nyonya Suwarni Pringgodigdo perwakilan Isteri Sedar dengan Nyonya Ratna Sari perwakilan Permi bagian Isteri, mengenai sudut pandang Poligami.⁶³ Nyonya Soewarni Pringgodigdo merasa tersinggung atas pidato Nyonya Ratna Sari yang berbunyi :

“Tiga tahoen jang laloe, maka ramailah soal polygamie diperbintjangkan di Indonesia sehingga menjebabkan rajat bercerai-berai. Terhadap pada penghina Islam ini dan kaoem2 jang memberi tjap bahwa memonopolie polygamie terhadap mereka inilah saja ingin beri nasehat soepaya mempeladjar Islam, soepaja djangan menentang polygamie dan mengadakan katjau balau diantara rajat Indonesia”.⁶⁴

Ketersinggungan perasaan ini dapat dimaklumi, karena haluan pergerakan dari Perkumpulan Isteri Sedar lebih kearah perbaikan kedudukan Perempuan dalam hal politik, emansipasi terhadap derajat Perempuan, dan Isteri Sedar tidak ingin dianggap sebagai penghina Agama Islam karena menentang adanya poligami. Sebenarnya dalam pidato Nyonya Ratna Sari sebelumnya telah dikatakan, yaitu orang-orang yang akan melakukan poligami harus memenuhi suatu persyaratan, yaitu mampu berbuat adil, dan poligami ini juga bertujuan mencegah adanya perzinaan (berkembangnya prostitusi).⁶⁵

Setelah pengumuman yang dilakukan oleh Nyonya Sri Mangoensarkoro, acara dilanjutkan dengan penyerahan piala sepak bola kepada kesebelasan PSSI yang menang dalam perlombaan, yang diwakilkan oleh Mr. Koentjoro yang

⁶³ Ibid, hal 2

⁶⁴ “Keterangan dari njonja Soewarni Pringgodigdo”, *Pemandangan*, (26 Juli 1935), hal 1

⁶⁵ “Kongres Perempuan Indonesia yang ke II, RAPAT OEMOEM KEDOEAE,” *Bintang Timoer*, (23 Juli 1935), hal. 2

merupakan Ketua Komite PSSI. Suasana penyerahan piala-piala tersebut berlangsung dengan meriah, membuat peserta Kongres merasa senang. Perlombaan sepak bola ini diadakan untuk meramaikan dan merupakan bentuk dukungan kaum laki-laki atas terselenggaranya Kongres Perempuan Indonesia II ini.⁶⁶ Tanda berakhirnya Kongres Perempuan Indonesia II yaitu dengan diteriakannya “Hiduplah Kongres Ibu” sebanyak tiga kali oleh Tuan Soerjodipetro, kemudian dinyanyikannya lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sesudah itu diperbolehkannya masyarakat umum melihat kerajinan tangan dari kaum perempuan.⁶⁷



⁶⁶ “V.I.J.” *Pemandangan*, (19 Juli 1935), hal. 6

⁶⁷ *Bintang Timoer*, (24 Juli 1935), hal 2

Bab IV

Hasil-hasil Kongres Perempuan Indonesia II

Pada tanggal 24 Juli 1935 Kongres Perempuan Indonesia berakhir dan menghasilkan keputusan yang cukup memberikan arahan yang jelas dalam perjuangan kaum perempuan dalam usahanya memperbaiki nasib perempuan Indonesia. Berikut ini adalah putusan-putusan dan mosi Kongres Perempuan Indonesia II:⁶⁸

Putusan-putusan Kongres Perempuan Indonesia II

1. Kongres membuat suatu badan penyelidikan perburuhan perempuan Indonesia yang mempunyai kewajiban menyelidiki keadaan buruh perempuan diseluruh Indonesia, susunan badan ini diserahkan kepada Ny. Sri Mangoensarkoro.
2. Setiap anggota Kongres diwajibkan mengusahakan adanya pemberantasan buta huruf. Agar pelaksanaan dari pekerjaan ini berjalan dengan baik, maka oleh Kongres diadakan *regristratiebureau* (kantor pendaftaran), yang berhak menetapkan masing-masing anggota, setiap anggota mempunyai tugas mengajarkan kepada beberapa orang yang buta huruf dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh *regristratiebureau*. Pada Kongres yang akan datang, anggota-anggota Kongres sedikitnya harus memberantas buta huruf kurang lebih 5000 perempuan yang sudah dewasa. Susunan badan *regristratiebureau* itu diserahkan kepada Ny. Soemadhi (Jakarta), Ny. Thamrin, Ny. Soeparto.
3. Anggota-anggota Kongres diwajibkan menjalin hubungan sebanyak-banyaknya dengan para pemuda, agar tercipta suasana saling pengertian antara golongan tua dan golongan muda. Sehingga pada masa yang akan datang pekerjaan dari golongan tua bisa dilanjutkan oleh golongan muda dengan sebaik-baiknya. Untuk menuju suatu hubungan baik, maka harus berdasarkan pada sikap menghargai dan tidak saling membanggakan diri.

⁶⁸ *Pedoman Isteri*, (Juli-Agustus 1935 No.7-8 tahun ke-4), hal 120

4. Untuk selanjutnya Kongres ini akan diadakan setiap 3 tahun sekali. Nama yang diberikan pada Kongres ini tetap Kongres Perempuan Indonesia.
5. Kongres yang akan datang akan diadakan di Bandung. Susunan badan persiapan Kongres diserahkan kepada Ny. Emma Poeradiredja.
6. Kongres menerima dengan baik dasar-dasar sementara dari Kongres ini, sebagai dasar yang tetap untuk arah perjuangan perempuan selanjutnya, yaitu:
 1. Rasa Nasionalisme
 2. Kesosialan
 3. Kenetralan
 4. Keperempuanan

Rasa Nasionalisme harus ada, karena setiap pergerakan harus mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi untuk mencapai kemerdekaan. Tentang dasar kesosialan, Kongres memberikan keterangan bahwa: segala topik pembahasan dan pekerjaan Kongres ditujukan kepada perbaikan masyarakat pada umumnya dengan tidak memasukkan pembahasan tentang agama dan politik. Dasar kenetralan adalah mengenai haluan-haluan dari setiap Perkumpulan yang berbeda-beda, tidak boleh diicampurkan kedalam pembahasan didalam Kongres, harus hanya yang bersifat sosial saja. Keperempuanan adalah kegiatan yang ada harus bersifat perbaikan nasib Perempuan.

7. Setiap Kongres dipimpin oleh pengurus Kongres yang baru, yang disusun oleh Pengurus Kongres yang sekarang.
8. Kongres menganjurkan kepada seluruh anggota agar menyelidiki kedudukan perempuan dalam hukum Islam dan mendukung badan penyelidikan talaq dan nikah yang sudah didirikan oleh Pasoendan Istri.
9. Kongres menetapkan bahwa kewajiban perempuan Indonesia yang utama ialah menjadi “ibu bangsa”, yang berarti bahwa tiap-tiap perempuan Indonesia wajib berusaha akan munculnya bangsa baru, yang lebih sadar akan kebangsaan.

10. Kongres telah menerima mosi tentang perkawinan dalam hukum Islam, dan isinya adalah.⁶⁹

MOTIE KEPADA RA'JAT INDONESIA

Tentang perkawinan menoeoet hoekoem Islam di Indonesia
Kongres Perempuan Indonesia jang ke II, jang terdiri atas perkoempoelan-perkoempulan perempuan, jaitoe:

1. Pasoendan Isteri
2. Perkoempulan Roekoem Isteri, Tangerang
3. Sarekat Poetri Islam, Makasar
4. Permi bagian Isteri, Padang
5. Wanita Kentjono, Banjarnegara
6. Poetri Boedi Sedjati, Surabaya
7. Wanita Oetomo, Mataram, Yogyakarta
8. Isteri Indonesia, Jakarta
9. Madjelis Departement P.S.I.I. bagian Isteri, Garut
10. Persaudaraan Isteri, Bandung
11. Wanito Taman Siswa, Mataram, Yogyakarta
12. Wanito Sedjati, Bandung
13. Santojo Rini, Solo

Dan dihadiri oleh 3 perkoempoelan anggota pendengar, serta beberapa perempuan pendengar lainnya, bersidang dalam rapat tertoeoep di gedung Pergoeroean Ra'jat Djakarta pada hari 23 Juli 1935

setelah mendengarkan

beberapa kedjadian jang berhoeboengan dengan perkawinan dalam hoekoem Islam di seloeroeh Indonesia dan menjelidiki bagaimana seharusnja kedjadian itoe haroesnja berlakoe dengan sebenarnja menoeoet hoekoem Islam.

berpendapatan

bahwa peratoeran-peratoeran jang berhoeboengan dengan perkawinan dalam hoekoem Islam di Indonesia tidak selamanja di jalankan dengan semestinja oleh badan jang wadjib, hingga menimboelkan beberapa keboeroekan-keboeroekan, kekoerang-adilan dalam soal perkawinan itoe dan memoetoeskan:

Mewadjabkan segala anggota Konggres soepaja, djika orang terkena oleh keboeroekan dan kekoerang-adilan dalam jang berhoeboengan dengan perkawinan menoeoet hoekoem Islam, tetapi jang tidak berlakoe dengan sebenarnja, selaloe bersedia oentoek member pertolongan dan perlindoengan semestinja.

dan menjampaikan motie ini kepada pers dan perkoempoelan bangsa Indonesia.

Tertanda

Pengoeroes Konggres Per. Ind. II

Ketua,
Sri Mangoensarkoro

Penitera,
Markisah Dahlia
Nj. Mohamad Roem⁷⁰

⁶⁹ Ibid, hal 121

⁷⁰ *Pedoman Isteri*, Juli-Agustus 1935, hal. 122

Mosi diatas merupakan perwakilan dari suara Perkumpulan-perkumpulan Perempuan yang berkongres pada waktu dan merupakan keinginan masyarakat dalam usahanya meninggikan derajat kaum Perempuan. Hasil mosi diatas adalah menuntut adanya peraturan yang jelas bagi para laki-laki yang menginginkan untuk berpoligami. Adanya hukuman ketika seorang laki-laki yang berpoligami dan menelantarkan anak-anak berserta isterinya, ataupun adanya peraturan yang jelas tentang syarat-syarat seorang laki-laki dapat melakukan poligami. Banyak kaum Perempuan merasa kekuasaan laki-laki atas diri perempuan itu sendiri terlalu mengikat dan tidak terbatas (bisa melakukan apa saja terhadap Perempuan yang dinikahnya, termasuk dapat melakukan poligami lalu menelantarkan isteri yang dinikahi sebelumnya).⁷¹

11. Kongres mendirikan suatu komisi, yang diberi hak untuk memberikan keterangan resmi tentang segala hal mengenai Kongres.

Komisi ini terdiri atas:

1. Ny. Mangoensarkoro.
2. Ny. Soeparto.
3. Nn. Soehara.
4. Nn. Mr. Maria Ulfa.

Setelah melihat putusan-putusan yang diambil oleh Kongres Perempuan Indonesia II, hal ini merupakan kemajuan yang besar bagi arah pergerakan kaum perempuan Indonesia dalam usahanya memperbaiki kehidupan kaumnya. Pada Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, masalah tentang perburuhan belum mendapatkan perhatian, usaha pemberantasan buta huruf serta pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak juga belum dibicarakan. Kongres yang pertama hanya menitik beratkan pada hal-hal yang menyangkut dengan perbaikan kehidupan keluarga saja, misalnya perempuan dalam hukum perkawinan (Islam), mencegah perkawinan anak-anak, memberikan pendidikan keterampilan dengan beasiswa.

⁷¹ "Emancipasi Perempuan," *Pedoman isteri*, Januari 1936, hal 67

IV.1 Pendidikan

A. PEMBERANTASAN BUTA HURUF

Usaha yang dilakukan oleh PPII dalam rangka memperbaiki pendidikan bagi anak-anak Indonesia adalah dengan mendirikan Badan Pemberantasan Buta Huruf. Khusus bagi anak-anak gadis didirikan Yayasan “Seri Derma”, bertujuan untuk membantu anak-anak gadis yang tidak mampu membayar biaya sekolahnya, melanjutkan sekolahnya baik sekolah menengah, tinggi maupun sekolah-sekolah keahlian.

Seri Derma merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang pembiayaan pembelajaran para anak-anak gadis, baik memberikan pinjaman untuk biaya pendidikan maupun memberikan beasiswa kepada gadis-gadis tidak mampu tetapi mempunyai kemampuan berpikir yang baik.⁷² Setiap tahun pengurus dari Seri Derma ini mengadakan rapat. Rapat berisi tentang pertanggung jawaban Seri Derma terhadap PPII melaporkan perkembangan baik dari yayasan Seri Derma maupun perkembangan dari anak-anak gadis yang dibantu oleh yayasan ini. Dana yang didapat adalah dari iuran para anggota yang tidak ditetapkan jumlahnya, iuran ini bisa berbentuk uang ataupun barang.⁷³ Dan dikarenakan banyak pengurus dari PPII ini yang berasal dari golongan atas (bangsawan), maka secara tidak langsung mereka memberikan dana tambahan bagi beasiswa para gadis yang dikordinir oleh yayasan Seri Derma ini. Untuk mengawasi jalannya yayasan Seri Derma ini, maka PPII membuat suatu *Commissie Van Toezicht* (Badan Pengawas), yang terdiri dari 3 orang anggota (tidak harus anggota dari PPII)

Pemberian pinjaman dana pendidikan kepada anak gadis mempunyai suatu persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu harus berjanji akan mengembalikan semua uang yang dipinjam, ketika mengajukan pinjaman harus menyertakan surat kesehatan dari dokter, para gadis beserta orangtuanya diwajibkan menandatangani surat perjanjian untuk melunasi pembayaran itu. Hal ini memperlihatkan adanya respon masyarakat dalam hal peningkatan pendidikan bagi anak-anak gadis.

Dalam hal pemberian beasiswa, PPII mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi juga oleh para calon penerima beasiswa, yaitu selain dari kalangan tidak mampu, gadis-gadis yang mendapatkan beasiswa harus mendapatkan nilai raport

⁷² “Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Studiefonds “Seri Derma””, *Isteri*, (1933), hal 106

⁷³ *Ibid*, hal 106

dan hasil ujian-ujian yang diadakan oleh sekolah dengan nilai yang baik, sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh PPII. Tidak akan ada pembiayaan dari PPII lagi, jika para gadis yang diberi beasiswa itu nilainya tidak mencapai target, walaupun dana beasiswa yang dimiliki oleh PPII masih ada.⁷⁴

Setiap anggota Kongres diwajibkan mengusahakan adanya pemberantasan buta huruf. Agar pelaksanaan dari pekerjaan ini berjalan dengan baik, maka oleh Kongres diadakan *regristratiebureau* (kantor pendaftaran), yang berhak menetapkan masing-masing anggota, setiap anggota mempunyai tugas mengajarkan kepada beberapa orang yang buta huruf dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh *regristratiebureau*. Pada Kongres yang akan datang, anggota-anggota Kongres sedikitnya harus memberantas buta huruf kurang lebih 5000 perempuan yang sudah dewasa. Susunan badan *regristratiebureau* itu diserahkan kepada Ny. Soemadhi (Jakarta), Ny. Thamrin, Ny. Soeparto.

Diharapkan dengan adanya yayasan Seri Derma ini, dunia pendidikan bagi kaum perempuan dapat berkembang. Tidak hanya untuk kaum kalangan atas saja yang mendapatkan pengajaran, tetapi juga kalangan bawah.

IV.2 Sosial

A. BURUH PEKERJA PEREMPUAN

Hal yang menjadi pokok utama mengapa seseorang mau menjadi seorang buruh pekerja adalah karena kemiskinan. Alasan ini juga yang pada akhirnya melatar belakangi adanya permasalahan buruh perempuan.

Buruh perempuan sebagaimana buruh laki-laki dibagi menjadi dua golongan, buruh halus dan buruh kasar. Pembagian ini didasarkan pada tingkat kemampuan membaca dan menulis seseorang. Yang termasuk kedalam golongan buruh halus antara lain yaitu juru tulis, guru-guru, juru ketik dan pelayan perempuan di toko, buruh halus ini disebut juga dengan buruh terpelajar. Golongan buruh halus ini hanya terdapat sedikit sekali. Penyebab yang melatar belakangi adanya buruh halus ini adalah biasanya untuk menutupi kekurangan dalam kebutuhan rumah tangganya atau membantu orang tua untuk membiayai pendidikan bagi adik-adiknya. Dampak dari seseorang yang melakukan pekerjaan

⁷⁴ Ibid, hal 108

buruh halus ini adalah berubahnya gaya hidup antara dirumah (adat) dan ditempat pekerjaan (modern), baik bagi para ibu rumah tangga maupun para gadis-gadis. Dampak yang ditimbulkan ketika seorang ibu melakukan pekerjaan di luar rumah yaitu terabaikannya pendidikan dari anak-anaknya yang ditinggal untuk bekerja, hal ini merugikan unuk anak-anak itu sendiri maupun untuk bangsa, sebagai generasi penerus. Untuk para gadis yaitu khususnya pekerjaan sebagai pelayan toko, tidak hanya rusak dalam hal pemikiran tetapi juga dalam hal moral.⁷⁵ Yang terpilih untuk menjadi pelayan toko ini adalah perempuan-perempuan yang mempunyai wajah yang cantik, yang bertujuan untuk menarik para pengunjung toko. Sedangkan dalam pandangan adat ketimuran, seorang perempuan yang sengaja menunjukkan kecantikan didepan umum, maka dianggap moralnya sudah mengalami penurunan.

Kaum buruh kasar terdiri dari pekerja-pekerja di pabrik-pabrik. Keadaan buruh kasar ini sangat menyedihkan. Pada saat mereka melakukan pekerjaan, mereka mendapatkan upah yang sangat kecil, tidak sebanding dengan pekerjaan mereka yang sangat berat. Kaum buruh ini pun mengalami tindak kekerasan oleh majikannya dan banyak pula yang kehilangan kesuciannya karena majikannya tersebut. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh para majikan ini tidak manusiawi, contohnya adalah memberi hukuman dijemur pada siang hari dengan tidak mengenakan kain sehelai pun, diikat pada pohon besar, bahkan dilukai dengan menggunakan api, dan lain sebagainya.

Pada Kongres Perempuan Indonesia II diputuskan untuk membuat Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan Indonesia (BPPPI), yang berkewajiban menyelidiki keadaan buruh wanita di Indonesia. Dibentuknya Badan Penyelidikan Perburuhan Kaum Perempuan, mengingat nasib buruh yang sangat menyedihkan, khususnya pada industri batik, maka dibuatlah badan ini. PPII pernah mengadakan rapat umum di Lasem (Jawa Tengah) untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada buruh batik perempuan agar sadar akan hak-haknya yang terabaikan oleh para pemilik pabrik. Susunan badan ini diserahkan kepada Nyonya Sri Mangoensarkoro. Badan tersebut dalam usaha penyelidikannya tentang buruh perempuan di Indonesia adalah menyebarkan *massale enquete* (angket masal)

⁷⁵ *Isteri*, 1933. Hal 49.

untuk mengetahui keadaan buruh yang mempunyai gaji kurang dari f. 15 perbulan.

Salah satu alasan mengapa didirikan Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan adalah karena adanya nasib yang sangat menyedihkan buruh perempuan di pabrik batik Lasem, Jawa Tengah.

Nasib yang menyedihkan buruh perempuan batik terlihat ketika munculnya Batikrapport yang ditulis oleh P. De Kat Angelino, *Inspecteur Kantoer van Arbeit*, buruh batik di tanah Jawa sangat menyedihkan nasibnya. Yang sangat menjadi perhatian adalah nasib buruh perempuan di Lasem, Jawa Tengah.

Para buruh perempuan di pabrik ini mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari para pemilik pabrik, seperti halnya dalam pembayaran upah, hutang, denda-denda yang memberatkan, sampai adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pemilik pabrik tersebut.

Pembayaran, para buruh batik perempuan tersebut kebanyakan dari mereka tidak mendapat upah diatas 12,5 sen perhari, rata-rata hanya 10 sen- 2,5 sen perhari, upah mereka ini dibayarkan setelah 4 hari mereka bekerja. Kecilnya upah yang mereka terima dikarenakan adanya pembebanan biaya produksi kepada buruh batik ini, misalnya membayar kayu untuk memasak lilin, penerangan listrik. Dalam sehari para pembatik ini hanya makan satu kali, nasi dan tempe, mereka tidak mengenal makanan yang menyehatkan, seperti daging, telur, ikan, dan lain-lain, hal ini terlihat dari tubuh mereka yang kurus.⁷⁶

Hutang, dengan kecilnya upah yang mereka terima, maka mau tidak mau mereka berhutang kepada pemilik pabrik tersebut untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Para pemilik pabrik sangat mudah memberikan pinjaman, hal ini dikarenakan semakin banyak buruh perempuan ini meminjam, maka akan semakin susah para buruh ini membayar hutangnya, sehingga mereka harus bekerja di pabrik itu seumur hidupnya.⁷⁷

Denda, para pembatik sering dikenakan denda. Denda-denda ini sangat banyak macamnya. Setiap kesalahan sekecil pun, maka para buruh batik ini akan terkena denda. Misalnya, jika ada ayam dari pemilik pabrik ini jatuh kedalam

⁷⁶ *Pedoman Isteri*, (April 1932 1935 No. 4 tahun pertama), hal . 61

⁷⁷ *Ibid*, hal 62

sumur atau ayam ini tidak bertelur, maka para buruh ini mendapatkan denda. Kain batik yang terkena bunga api harus diganti oleh buruh batik tersebut. Denda juga akan dikenakan kepada buruh batik ini, ketika dia mengambil potongan-potongan kayu untuk memasak lilin, padahal lilin tersebut adalah bahan yang akan dibuat menjadi batik. Bahkan ketika buruh ini disuruh untuk membelikan telur oleh pemilik pabrik, dan didapatkan telur tersebut tidak sama besar, maka buruh ini mendapatkan denda lagi. Denda-denda yang diberikan oleh pemilik pabrik kepada buruh batik ini sangatlah tidak masuk akal dan amat sangat memberatkan.

Tindak kekerasan terhadap buruh batik ini sangatlah menyedihkan. Pukulan, baik yang mempergunakan tangan atau alat-alat (seperti kayu, sandal), diseret dengan rambut yang ditarik, seringkali diterima buruh batik ini ketika pemilik pabrik sedang marah. Para buruh batik ini diberikan waktu untuk istirahat, tidur, hanya 4 jam, jika lebih dari itu maka pemilik pabrik akan menyiram buruh batik ini dengan air dingin atau akan di jemur pada siang hari.⁷⁸

B. PERDAGANGAN PEREMPUAN

Hal yang paling hina dan menyedihkan, serta menjadi suatu ketakutan bagi seorang perempuan adalah ketika mereka diperdagangkan layaknya seperti barang. Penyebab adanya perdagangan perempuan ini bisa bermacam-macam, antara lain:

1. Karena kemauan sendiri,
2. Karena tertipu,
3. Karena uang,

Banyak lagi hal-hal lain yang menjadi penyebab mengapa perempuan-perempuan ini terjebak dalam perdagangan manusia tersebut.⁷⁹

Kejahatan dari perdagangan ini adalah menjatuhkan derajat perempuan serendah-rendahnya, maka timbullah rasa empati para kaum perempuan pada waktu itu untuk bersama-sama bekerja dalam rangka melenyapkan atau setidaknya mengurangi perdagangan perempuan.

⁷⁸ Ibid, *Pedoman Isteri*, hal 63

⁷⁹ “Pergerakan dan Perkoempoelan Isteri, Perdagangan Perempoean, “ *Pedoman Isteri*, (Mei 1932), hal.81.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh kaum perempuan pada masa itu adalah memberikan penyuluhan-penyuluhan ke desa-desa tentang bagaimana para biro-biro pekerjaan menipu mereka, yang menjanjikan gaji besar serta kehidupan yang layak kepada mereka. Selain itu mereka juga diberikan pengajaran tentang keterampilan-keterampilan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber mata pencaharian mereka.

Mengenai hal perdagangan perempuan ini kaum pergerakan perempuan menaruh perhatian besar. Atas anjuran PPII, maka pada tahun 1932 didirikanlah suatu perkumpulan di Yogyakarta, yaitu Perkumpulan Pembasmian Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (PPPPA). Maksud dan tujuan dari perkumpulan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Mencegah segala sifat pelecehan, yang mempergunakan perempuan sebagai objek untuk kepuasan laki-laki (seks).
- b. Mencegah perdagangan perempuan dan anak-anak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Komite PPPPA mengadakan kegiatan-kegiatan, yaitu :

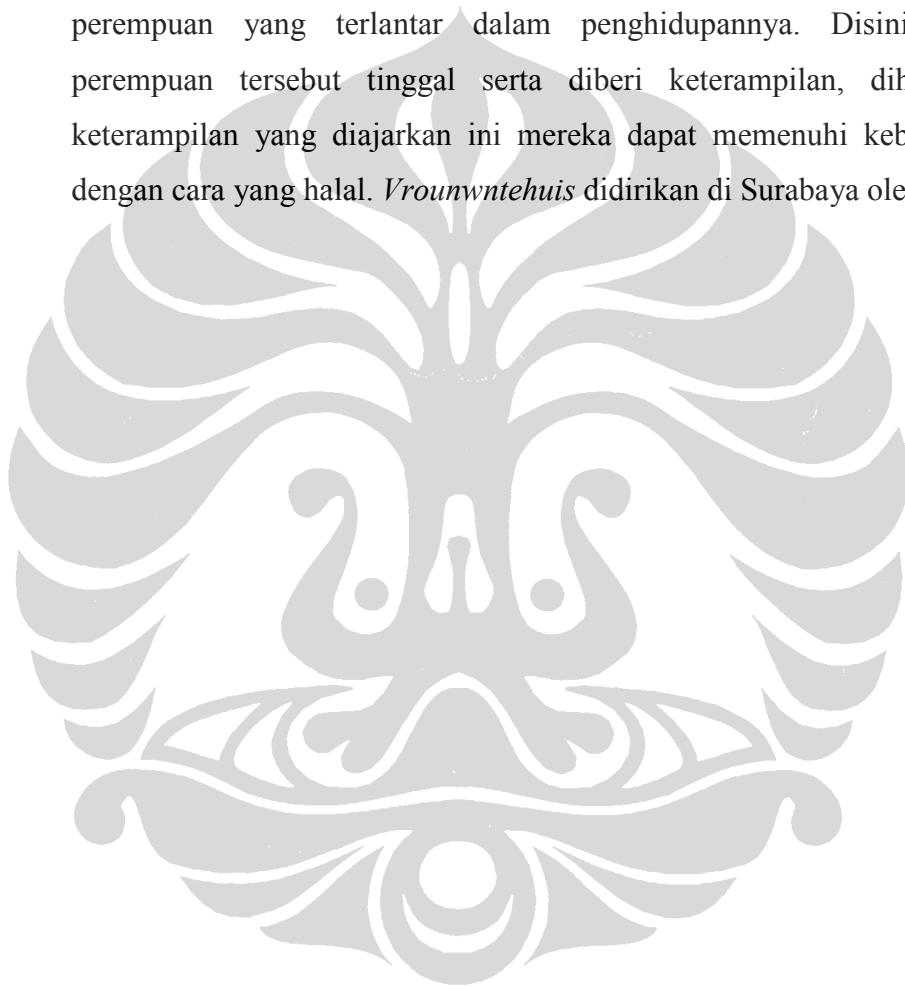
- a. Memberikan penyuluhan-penyuluhan atau dengan membacakan dan membagikan brosur
- b. Memberikan bantuan kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban dari perdagangan tersebut dan sebagainya.
- c. Komite membuat rumah-rumah perlindungan untuk perempuan-perempuan yang menjadi korban perdagangan tersebut.
- d. Sebisa mungkin mengadakan pemantauan terhadap kedatangan dan keberangkatan kereta api dan kapal-kapal⁸⁰, serta mengadakan penyuluhan-penyuluhan di desa-desa.
- e. Mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan maksud dari Komite.

PPPPA ini mempunyai beberapa cabang. Pada permulaan bulan Mei 1932, PPPPA mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta. Putusan-putusan dari kongres tersebut, antara lain :

⁸⁰ Kereta Api dan Kapal-kapal merupakan sarana transportasi untuk melakukan perdagangan manusia ini.

1. Kedudukan pedoman besar tetap di Yogyakarta, sedangkan sebagai ketua dipilih Nyonya Soekemi.⁸¹
2. PPPPA seluruhnya akan mengumpulkan tenaganya agar dapat mendirikan *Vrouwentehuis* di Solo.
3. PPPPA akan membuat suatu badan organisasi yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan tujuan perkumpulan itu.

Maksud *Vrouwentehuis* ini adalah perumahan untuk perempuan-perempuan yang terlantar dalam penghidupannya. Disinilah perempuan-perempuan tersebut tinggal serta diberi keterampilan, diharapkan dengan keterampilan yang diajarkan ini mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang halal. *Vrouwentehuis* didirikan di Surabaya oleh *Studieclub*.



⁸¹ *Pedoman Isteri*, (Mei, 1932), hal. 83